SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B

Program Studi Ilmu Politik
Kajian Ilmu Politik

Oleh:

Kristiani Kresensia Clara
NIM. E1051171076

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B

Tanggung Jawab Yudiris Pada:

Kristiani Kresensia Clara
NIM. E1051171076

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Bakran Suni, M.Ag
NIP. 195912121990021001

Tanggal: 16/7/2024

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, M.Si
NIP. 196905142007011004

Tanggal: 3/7/2024

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B

Oleh :
Kristiani Kresensia Clara
E1051171076

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Rabu / 31 Juli 2024
Waktu	; 08.00 Wib – Selesai
Tempat	: Ruang Sidang FISIP UNTAN

Ketua	Sekretaris
Dr. Bakran Suni, M.Ag	Hairil Anwar, M.Si
NIP. 195912121990021001	NIP. 196905142007011004
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Drs. Asmadi, M.Si	Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si
NIP. 196202041988101001	NIP. 198506092015041002

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Kristiani Kresensia Clara: Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. **Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2024.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Permasalahan tersebut dirasa cukup menarik dikarenakan pada tahun 2022 kebawah tidak terdapatnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dalam pengelolaan dana desa. selain itu kurangnya transparansi dalam penghapusan rancangan pembangunan yang sebelumnya sudah direncankan pada Musrenbagdes, dan yang terakhir kurangnya pengawasan pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam mengawasi pengelolaan dana desa pada Desa Retok. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan subjek penelitian ini ialah Kepala Desa/ Sekretaris Desa Retok, Bendahara Desa/ Kaur Keuangan Retok, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Retok, Masyarakat Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Hasil penelitian ini ialah akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perancanaan, pelaksanaan, pertangggungjawaban dan pengawasan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hanya saja masih perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi seperti pelaksanaan perencanaan dana desa di Desa Retok pada tahun 2022 masih banyaknya yang belum terealisasi dengan anggaran dana yang cukup besar. Pertanggunggjawaban dana desa berupa LPJ harus segera disesuaikan berupa SPJ guna keberhasilan suatu desa dan pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Retok perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Desa

ABSTRACT

Kristiani Kresensia Clara: Government Accountability in Managing Village Funds in Retok Village, Kuala Mandor District B. **Thesis. Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University. Pontianak 2024.**

The aim of writing this thesis is to determine the government's accountability in managing the village fund budget in Retok Village, Kuala Mandor B District. This problem is considered quite interesting because in 2022 and below there will be no Letter of Accountability (SPJ) as a form of government accountability in Retok Village, Kuala Mandor B District in management. village funds. Apart from that, there is a lack of transparency in eliminating development plans that had previously been planned at the Musrenbagdes, and finally there is a lack of supervision by the sub-district and district governments in supervising the management of village funds in Retok Village. Therefore, the researcher wants to know how accountable the government is in managing the village fund budget in Retok Village, Kuala Mandor B District. The researcher used a qualitative research method with a descriptive research type. The subjects of this research are the Village Head/Secretary of Retok Village, Village Treasurer/Retok Finance Head, Members of the Village Consultative Body in Retok Village, Retok Village Community, Kuala Mandor B District. The results of this research are the accountability of village fund management in planning, implementation, accountability and supervision is in accordance with established rules. It's just that it still needs to be improved to be even better, such as the implementation of village fund planning in Retok Village in 2022, there is still a lot that has not been realized with a fairly large budget. Accountability for village funds in the form of LPJ must be immediately adjusted in the form of SPJ for the success of a village and supervision of Village Fund Allocation in Retok Village needs to be paid attention to by the Kuala Mandor B District Government and the Kubu Raya Regency Government.

Keywords: Accountability, Management, Village Funds



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B". Judul ini dipilih karena di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2022 masih belum terdapat surat pertanggungjawaban (SPJ) guna pertanggungjawaban pengelolaan dana desa,selain itu kurangnya transparansi yang dilakukan dalam penghapusan rancangan pembangunan yang telah di rancang sebelumnya pada musyawarah desa dan yang terakhir kurangannya pengawasan/ audit dari pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Hasil penelitian ini ialah Pengelolaan dana desa di Desa Retok tahun 2023 lebih meningkat daripada tahun 2022. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor satu diantaranya ialah jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan kesulitan yang dialami setiap desa sesuai dengan kemahalan biaya konstruksi dan karakteristik daearahnya. Untuk pelaksanaan perencanaan dana desa di Desa Retok pada tahun 2022 masih banyaknya yang belum terealisasi. Sehingga daftar perencanaan yang ada di RKPDes belum tentu ada di APBDes dengan menyesuaikan dengan dana anggaran dana desa pada tahun tersebut.

Bentuk akuntabillitas dana desa di Desa Retok pada tahun 2022 ialah berupa LPJ dan papan informasi pada kegiatan yang dipasang pada lokasi kegiataan. Dari itu pertanggungjawaban pengelolaan dana pemerintah desa di Desa Retok masih belum sesuai dan harus segera diperbaiki yang awalnya hanya berupa LPJ harus segera disesuaikan berupa SPJ guna keberlangsungan desa tersebut. Pengawasan Alokasi Dana Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Adapun saran pada penelitian ini adalah jika ingin melakukan penghapusan beberapa perencanaan yang anggarannya tidak tercukupi hendaklah perwakilan dari masyarakat harus mengetahui nya agar tidak terjadi perbedaan asumsi dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada aparatur desa dalam mengelola alokasi dana desa tersebut; Perlunya Pendidikan atau bimbingan teknologi untuk Kasi dan Kaur Keuangan / Jabatan yang terkait mengenai penyusunan SPJ Transaksi dan SPJ Bulanan agar bentuk laporan pada tahun 2022 tidak terulangi pada tahun berikutnya dan pelaporan tahun 2023 dan seterusnya menjadi lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku; Diharapkannya Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan perhatian lebih khususnya pada Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Retok.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kristiani Kresensia Clara
NIM	: E1051171076
Program Studi	: Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



ni Kresensia Clara

NIM. E1051171076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

In the Name Of Jesus Christ

"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal"

(Ayub 42:2)

"Orang Tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu"

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orangtua saya, Alm. Bapak Anselmus dan Ibu Marta. Puji Tuhan kini penulis sudah berada di tahap ini, untuk Bapak, berat rasanya ditinggalkan saat proses penyusunan skripsi ini. Banyak hal menyakitkan yang penulis lalui tanpa sosok bapak. Terimakasih telah menjadi alasan kuatku hingga saat ini sampai menyelesaikan tugas akhir, semoga Bapak bangga dengan usahaku selama ini. Untuk Ibu, Terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ibu saya bisa berada dititik ini. Terima kasih telah sabar menunggu sampai ketitik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, usahakan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kepada Adikk-Adikku, Kristian Jaya Sanjaya, Kristian Deo Paskal dan Kristian Imannuel Zirre. Terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan kuat adik-adikku.

3. Sahabat penulis. Fia Juniawati, Agung, Awaludin Ali, Yuda Pratama, Gelva Fagea, Beda Yogi Fagea, dan Fathurozi yang telah menemani dari awal perkuliahan dan membantu penulis. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, doa, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Seluruh teman-teman ipol angkatan 17 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman selama di bangku kuliah ini.
5. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat dari-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisam skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
3. Dr. Bakran Suni, M.Ag Dosen Pembimbung Utama yang telah memberikan masukan kepada peneliti.

4. Hairil Anwar, SE selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Asmadi, M.Si selaku dosen penguji pertama saya yang telah banyak memberikan kemudahan serta masukan dalam penelitian skripsi ini.
6. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji kedua saya yang membimbing penulis dan memberikan saran serta masukkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.
7. Pembantu dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha, dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
8. Kantor Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dan Kantor Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya yang menjadi informan pada penelitian untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

ABSTRACT iv

RINGKASAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 4

1.3 Fokus Penelitian 5

1.4 Rumusan Masalah 5

1.5 Tujuan Penelitian 5

1.6 Manfaat Penelitian 6
1.6.1 Manfaat Teoritis 6
1.6.2 Manfaat Praktis 6
BAB II KAJIAN TEORI 7
2.1 Teori 7
2.1.1 Desa 7
2.1.1.1 Pengertian Desa 7
2.1.2 Dana Desa 9
2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 11
2.1.3.1 Tujuan Alokasi Dana Desa 13
2.1.3.2 Pengalokasian Dana Desa 13
2.1.3.3 Prinsip - Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 16
2.1.4 Akuntabilitas 20
2.1.4.1 Tujuan Akuntabilitas 21
2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas 23
2.1.4.3 Dimensi Akuntabilitas 25
2.1.4.4 Prinsip Akuntabilitas 26
2.1.5 Transparansi 27
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 30
2.2.1 Glory Sisilia Tuwo, dkk 30
2.2.2 Nengsi Lolo Allo, 2020 31
2.3 Kerangka Pikir 32

2.4 Pertanyaan Penelitian 33

BAB III METODE PENELITIAN 34

3.1 Jenis Penelitian 34

3.2 Langkah-langkah Penelitian 34

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 35

3.3.1 Lokasi Penelitian 35

3.3.2 Waktu Penelitian 35

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 37

3.4.1 Subjek Penelitian 37

3.4.2 Objek Penelitian 37

3.5 Teknik Pengumpulan Data 38

3.6 Instrumen/ Alat Pengumpul Data 39

3.7 Teknik Analisis Data 40

3.8 Teknik Keabsahan Data 42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 43

4.1. Kabupaten Kubu Raya 43

4.2. Desa Retok 47

4.3. Struktur Pemerintah Desa Retok 48

4.4. Visi, Misi, Motto Pemerintah Desa Retok 52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

5.1. Hasil Penelitian 53
5.1.1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok 54
5.1.2. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok 56
5.1.3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok 60
5.1.4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok 71
5.1.5. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok 72
5.2. Pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 73
5.2.1. Perencanaan Dana Desa di Desa Retok 74
5.2.2. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Retok 74
5.2.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok 75
5.2.4. Pengawasan Dana Desa di Desa Retok 76
BAB VI PENUTUP 78
6.1. Kesimpulan 78
6.2. Saran 79
6.3 Keterbatasan Penelitian 79
DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Kubu Raya 45

Gambar 4. 2 Kepadatan Penduduk..... 46

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Retok 48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 36

Tabel 5. 1 Laporan APBDes Tahun Anggaran 2022 di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B 54

Tabel 5. 2 Laporan APBDes Tahun Anggaran 2022 di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B 55

Tabel 5. 3 Perencanaan Program pelaksanaan Pembangunan Desa retok Tahun Anggaran 2022 57

Tabel 5. 4 Perencanaan Program pelaksanaan Pembangunan Desa retok Tahun Anggaran 2023 58

Tabel 5. 5 Program pelaksanaan Pembangunan Desa retok Tahun Anggaran 2022..... 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara..... 83

Lampiran 2 Daftar Nama Informan 84

Lampiran 3 Dokumentasi..... 85

Lampiran 4 Biodata Penulis..... 88

Lampiran 5 Surat Tugas 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan dan kemakuran rakyat serta Negara. Pemerintah juga memiliki tugas untuk membuat dan menetapkan hukum dan undang - undang di wilayah tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat terjadinya pemerataan dan keadilan secara menyeluruh.

Desa adaIah bentuk pemerintahan terkeciI yang dipimpin oleh KepaIa Desa. Pada umumnya digambarkan dengan infrastruktur yang tidak memadahi, lapangan pekerjaan yang sedikit dan masih melekat dengan tradisi-tradisi zaman dahulu. Namun, desa juga memiliki kekayaan sumber daya alam untuk itu masyarakat desa mayoritas berprofesi sebagai petani. Secara etimoIogi, desa berasaI dari bahasa Sansekerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah kelahiran, maupun tanah asal.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut maka desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah desa atau yang kita kenal dengan otonomi daerah, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi lebih maju, mandiri dan demokratis.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN Dana Desa (DD) merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa digunakan untuk membiayai penyeIenggaraan pemerintahan, peIaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DaIam pengeIolaan dana desa tersebut, harus sesuai dengan asas pengeIoIaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 2 tahun 2018 Tentang PengeloIaan Keuangan Desa, yang menyantakan “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksaanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan” dimana laporan ini harus bersifat transparansi, akuntabeI, partisipatif, diIakukan dengan tertib dan disipIin

anggaran. DaIam mengeIoIa keuangan Desa tersebut terdapat beberapa kegiatan meIiputi perencanaan, peIaksanaan, penatausahaan, peIaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, Dana Desa yang di anggarakan pada tahun 2020 smpai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat besar. Besarnya Dana Desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa dapat memberikan kemudahan dana dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, besarnya Dana Desa tersebut akan membuka kesempatan yang cukup luas dalam kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahaan desa agar dapat terkendali pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hasil observasi singkat di Desa Retok ini ditemukannya perbedaan hasil rencana rancangan pada saat musyawarah desa dengan rancangan yang direalisasikan dan belum diketahui penyebab atau alasan mengapa keputusan penghapusan rancangan tersebut dilakukan oleh sepihak tanpa memberitahukan atau melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini membuat transaparansi

dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut dipertanyakan oleh masyarakat.

Sehingga diperlukannya pengawasan karena dengan adanya pengawasan dapat memberikan dampak yang sangat berguna untuk menilai apakah dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya ataukah kegiatan tersebut sudah mencapai hasil sesuai dengan rencana yang dibuat. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah desa, pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan desa. Adapun pertanggungjawaban ini dapat berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Selaras dengan kian meningkatnya anggaran pemerintah dalam memberikan anggaran dana desa kepada desa Retok hingga tahun sekarang tanpa kita ketahui bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa tersebut. Maka dari uraian fenomena yang menarik diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B"**

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya surat pertanggungjawaban (SPJ) guna pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2022.
2. Kurangnya transparansi yang dilakukan dalam penghapusan rancangan pembangunan yang telah di rancang sebelumnya pada musyawarah desa.
3. Kurangannya pengawasan/ audit dari pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Hal ini berdasarkan permasalahan yang ditemui peneliti di lapangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalahnya ialah bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teori untuk menambah wawasan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mahasiswa mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi teman-teman mahasiswa prodi Ilmu Politik dan pihak lain yang ingin mengetahui tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

1.6.2.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sebagai referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan mahasiswa Ilmu Politik dan lainnya dalam penelitian sejenisnya.

1.6.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas dari pemerintah desa.